



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 28 Februari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : UNIVERSITAS BRAWIJAYA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **AGUS SUSILO**
2. Jabatan : **WAKIL DEKAN BIDANG UMUM, KEUANGAN, DAN SUMBER DAYA**
3. NHK : **664374**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. **2.945.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 153 m²/100 m² di KOTA MALANG ,
HASIL SENDIRI Rp. 650.000.000
2. Tanah Seluas 150 m² di KOTA MALANG , HASIL SENDIRI Rp.
175.000.000
3. Tanah Seluas 150 m² di KOTA MALANG , HASIL SENDIRI Rp.
180.000.000
4. Tanah Seluas 254 m² di MOJOKERTO, HASIL SENDIRI Rp.
175.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 80 m²/55 m² di MOJOKERTO, HASIL
SENDIRI Rp. 470.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 800 m²/200 m² di BANTUL,
WARISAN Rp. 460.000.000
7. Tanah Seluas 2000 m² di BANTUL, WARISAN Rp. 170.000.000
8. Tanah Seluas 2500 m² di BANTUL, WARISAN Rp. 215.000.000
9. Tanah dan Bangunan Seluas 153 m²/100 m² di KOTA MALANG ,
HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. **481.550.000**

1. MOTOR, HONDA GRAND Tahun 1997, WARISAN Rp. 2.400.000
2. MOTOR, JIALING 100 CC Tahun 2003, HASIL SENDIRI Rp.
1.050.000
3. MOTOR, HONDA SUPRA FIT Tahun 2002, HASIL SENDIRI Rp.
2.100.000



4. MOBIL, MITSUBISI PENUMPANG Tahun 2019, HASIL SENDIRI		
Rp. 210.000.000		
5. MOTOR, HONDA BLADE 125 CC Tahun 2015, HASIL SENDIRI		
Rp. 6.000.000		
6. MOBIL, TOYOTA PENUMPANG Tahun 2022, HASIL SENDIRI		
Rp. 260.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	94.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	86.000.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	3.606.550.000
III. HUTANG	Rp.	965.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	2.641.550.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.